

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) SEMESTER I TAHUN 2024

JL. SUMBING No. 17 TELP. (0282) 534400
CILACAP



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Jln. Sumbing Nomor 17 Telp (0282) 534400 Fax (0282) 531255

www.inspektorat.cilapkab.go.id

inspektoratcilacap@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester I Tahun 2024. Ikhtisar Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah Semester I Tahun 2024 berisi akumulasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada Semester I Tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2024.

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester I Tahun 2024 ini menyajikan perkembangan hasil pengawasan dan perkembangan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap baik yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun non PKPT, Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

Kami berharap dapat memberikan informasi kegiatan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam upaya perbaikan kinerja pengawasan dimasa mendatang untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Semester I Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Cilacap, September 2024
**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN CILACAP**

ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	iii
BAB I Informasi Umum	1
A. Dasar Hukum	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Kebijakan Strategis	3
D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan	5
E. Program Penyelenggaraan Pengawasan	6
F. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	7
BAB II Hasil Pengawasan	8
A. Audit	18
1. Audit Kinerja	18
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu	19
B. Reviu	22
C. Evaluasi	23
1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	23
D. Pemantauan	25
E. Kegiatan Pengawasan Lainnya	26
BAB III Pemantauan Tindak Lanjut	28
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – RI	29
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	29
BAB IV Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat	30
BAB V Penutup	31
A. Simpulan	31
B. Hambatan	32
C. Saran / Rekomendasi	32
LAMPIRAN	

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Berdasarkan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, pada Semester I Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebanyak 323 (Tiga ratus dua puluh tiga) Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Cilacap, antara lain secara garis besar dapat kami laporkan dan kelompokkan sebagai berikut:

1. Audit/Pemeriksaan

Pada Semester I Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan pengawasan berupa Audit/Pemeriksaan pada 32 (Tiga puluh dua) objek pemeriksaan, yang terdiri dari:

a) Audit Kinerja

- Audit Kinerja TIK pada Aplikasi dan Infrastruktur SPBE 1 Kegiatan
- Audit Kinerja SKPD 2 Kegiatan
- Audit Kinerja Desa 5 Kegiatan

b) Audit dengan Tujuan Tertentu

- Audit Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI 2 kegiatan
- Audit Investigasi 4 Kegiatan
- Pemeriksaan Khusus Aduan Masyarakat 1 Kegiatan
- PDTT Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 10 Kegiatan
- PDTT Pengelolaan Keuangan APBD TA 2023 1 Kegiatan
- PDTT Pengelolaan Dana Kelurahan 2 Kegiatan
- PDTT Evaluasi Penyusunan APBDES 2 Kegiatan
- PDTT Kegiatan PTSL 2 Kegiatan

2. Reviu

Telah dilaksanakan 18 jenis reviu dengan Jumlah total sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) kegiatan pada Semester I Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Reviu Laporan Realisasi DAU 7 Kegiatan
- Reviu DAK Fisik 19 Kegiatan
- Reviu SIM RS 1 Kegiatan
- Reviu Laporan Keuangan SKPD 10 Kegiatan
- Reviu LPPD 1 Kegiatan

- Reviu Kontrak Daftar Hitam 1 Kegiatan
- Reviu Harga Perkiraan Sendiri 4 Kegiatan
- Reviu Dana Hibah 1 Kegiatan
- Reviu LKPD BUD 1 Kegiatan
- Reviu Usulan Penjualan Kendaraan Dinas 1 Kegiatan
- Reviu Kinerja 5 Kegiatan
- Reviu Dokumen RKPD 1 Kegiatan
- Reviu THR dan Gaji-13 PPPK 1 Kegiatan
- Reviu RPJPD 1 Kegiatan
- Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa 1 Kegiatan
- Reviu ASB 1 Kegiatan
- Reviu Pembayaran Gaji PPPK 1 Kegiatan
- Laporan Reviu Perbaikan Dan Pengganti Data Calon Penerima Manfaat Percepatan Air Limbah Domestik 2 Kegiatan

3. Evaluasi

Pada Semester I Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan 55 (lima puluh lima) kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) pada 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 24 Kecamatan dan 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4. Pemantauan

Pada Semester I Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pemantauan/monitoring sebanyak 138 (Seratus tiga puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD 2 kegiatan
- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Desa Anti Korupsi 1 Kegiatan
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah 133 Kegiatan
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi 1 Kegiatan
- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI 1 Kegiatan.

5. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan Pengawasan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- Probit Audit Tahap Perencanaan 2 kegiatan

- Verifikasi Data by Name by Address (BNBA) 2 Kegiatan
- Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 11 Kegiatan
- Pengumpulan Bahan dan Keterangan Atas Pengaduan Masyarakat 1 Kegiatan
- Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 6 Kegiatan
- Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi 5 Kegiatan
- Opname Kas Persediaan 10 Kegiatan
- Evaluasi Internal (Perencanaan/Ex-Ante dan Pelaksanaan/On going) Reformasi Birokrasi 2 Kegiatan.

Adapun jumlah temuan hasil pemeriksaan tersebut adalah 445 temuan dengan nilai finansial sebesar Rp619.694.563,89 dan 766 rekomendasi terinci dalam Sub Kelompok rekomendasi, yaitu :

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat.	71
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan Masyarakat	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	-
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi	679
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	-
8	Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia pendukung system pengendali	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan.	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi.	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang.	16
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern.	-
13	Pelaksanaan Sosialisasi	-
14	Lain-lain	-
	Jumlah	766

*Data Semester I Tahun 2024

6. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pada Semester I Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap menangani kasus pengaduan masyarakat sebanyak 2 aduan masyarakat.

7. Permasalahan-permasalahan yang dijumpai

Berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap permasalahan yang sering terjadi antara lain:

1. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tertib.
2. Pengeluaran Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Inefisiensi belanja Material untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang berakibat terjadi pemborosan keuangan daerah/desa.
4. Pelaksanaan pekerjaan sarana prasarana tidak sesuai dengan volume sesuai dengan RAB.
5. Pajak atas belanja dana desa belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara.
6. Belanja langsung tidak diyakini kebenarannya.
7. Belanja tidak disertai dengan bukti dukung yang memadai sebagai lampiran LPJ.
8. Sistem pengendalian intern yang kurang maksimal sehingga masih sering terjadi *Fraud*.

8. Saran/Rekomendasi :

1. Ditetapkan Pola Pembinaan dan hubungan kerja antar Aparatur Pengawasan (Auditor dan PPUPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Kepada setiap jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terus meningkatkan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara berjenjang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
3. Untuk mengoptimalkan fungsi monitoring kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi verifikasi terhadap pengelolaan keuangan di desa serta perlu disusun pedoman teknis monitoring dan evaluasi dari Dispermades selaku Dinas Teknis, sehingga ada kejelasan maksud, tujuan, sasaran serta hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan fungsi tersebut.

4. Untuk pengelolaan dana BOS diperlukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin atas Penatausahaan dan Pertanggungjawaban dana BOS oleh Dinas Teknis, dikarenakan sebagian besar pengelola dana BOS di sekolah adalah guru yang tidak memiliki dasar pengetahuan akuntansi.
5. Penambahan personil Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap baik melalui perekrutan/pengadaan formasi CPNS maupun mutasi dari OPD/Daerah lain guna menyeimbangkan beban kerja pengawasan yang harus dijalankan agar semua objek pengawasan terawasi setiap tahun secara rutin.
6. Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan baik di OPD maupun Desa perlu terus dilakukan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan fasilitasi dalam hal pengelolaan keuangan sehingga tidak terjadi temuan berulang dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *Good Government dan Clean Governance* dapat terwujud.
7. Perlunya penggunaan sistem aplikasi yang khusus menangani kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, sehingga dapat dimonitor secara tepat dan akurat.

BAB I INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024;
9. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/519/14/Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/520/14/TAHUN 2023 Tentang Penetapan Pembagian Wilayah Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.

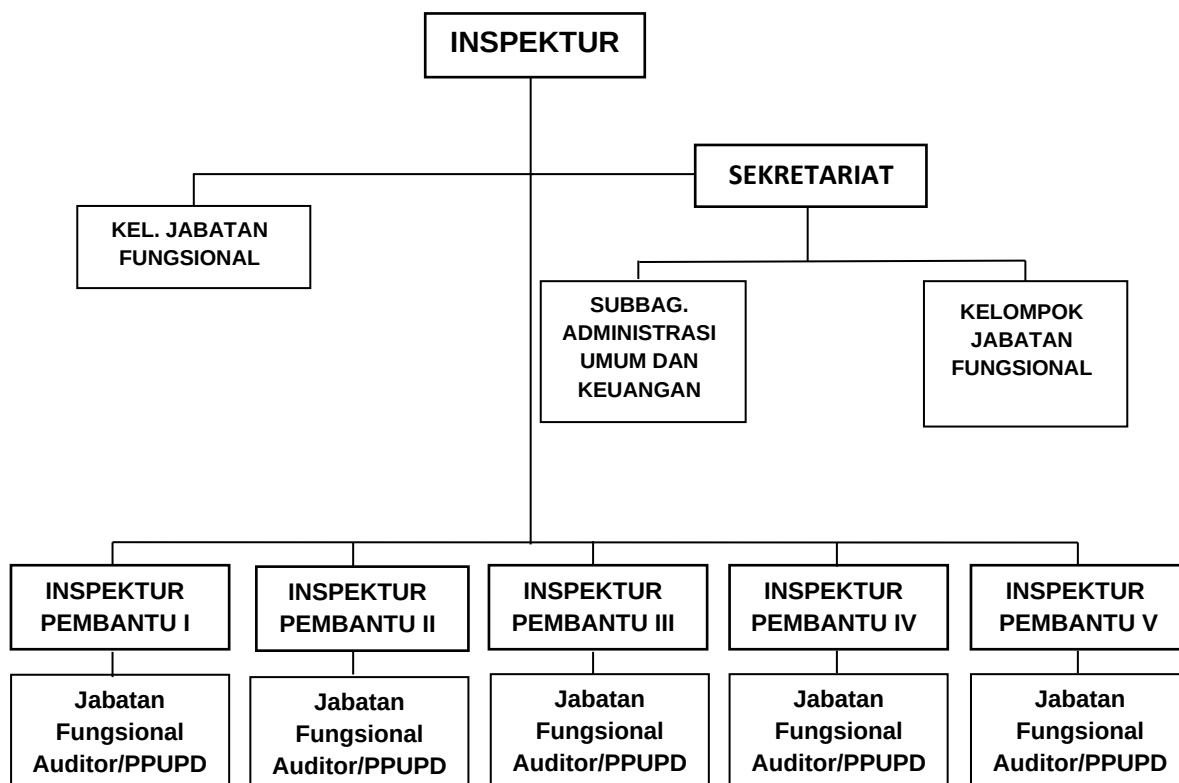
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dapat diuraikan dan digambarkan sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :

- 1). Inspektur Daerah
- 2). Sekretariat membawahkan:
 - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 3). Inspektur Pembantu terdiri dari:
 - Inspektur Pembantu I
 - Inspektur Pembantu II
 - Inspektur Pembantu III
 - Inspektur Pembantu IV
 - Inspektur Pembantu V

b. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap



C. Kebijakan Strategis

1. Eksternal

Visi pembangunan jangka panjang daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah: “Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera” dimana dalam periode tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan Tahun Anggaran 2023-2026 adalah memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Diterapkannya nilai-nilai luhur yang berasal dari budaya dan agama dalam praktek kehidupan sehari-hari;
2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi;
3. Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tenteram dan damai;
4. Investasi-investasi besar semakin mantap dalam memainkan perannya sebagai agen pembangunan sehingga stabilitas pertumbuhan perekonomian yang tinggi dapat tercapai;
5. Potensi daerah telah dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tercipta produk yang mempunyai daya saing tinggi dan banyak diminati;
6. Keseimbangan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam;
7. Infrastruktur yang telah mampu mendinamisir ekonomi kerakyatan;
8. Mantapnya masyarakat yang senantiasa aktif dalam setiap kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga mampu melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara mandiri;
9. Terwujudnya masyarakat menjadi faktor yang memiliki peran yang sama besar dengan faktor pembangunan lainnya sehingga partisipasinya menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan.

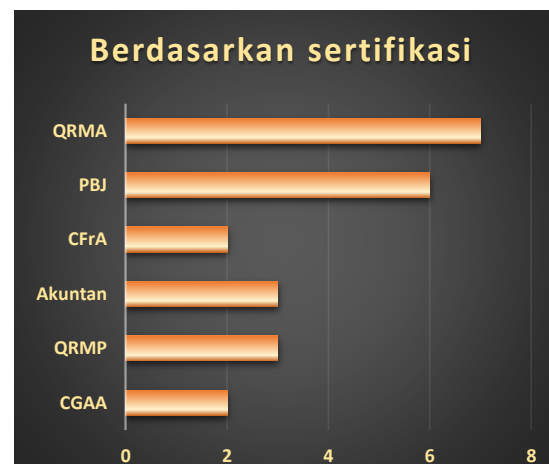
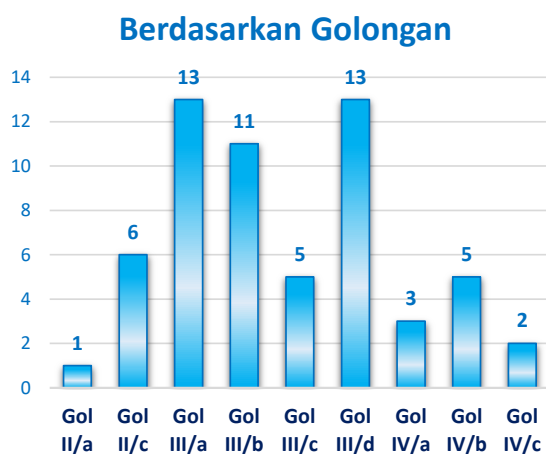
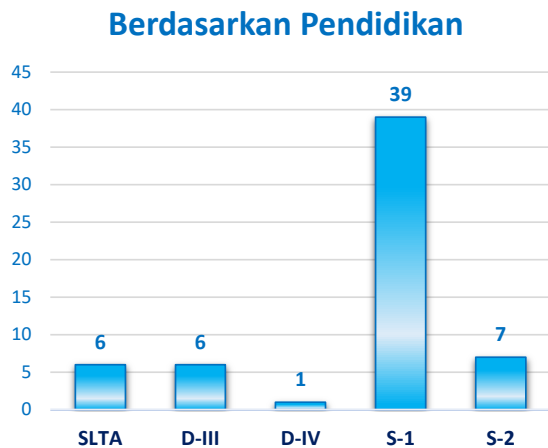
2. Internal

Sebagai gambaran mengenai keberhasilan penguatan dibidang pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tertera dalam Renstra Periode Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatkan Penerapan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan Maturitas SPIP Level 3.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana target yang tertuang dalam Renstra perlu didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a) Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap memiliki 59 (lima puluh sembilan) sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN). Selengkapnya data ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Profil Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap

b) Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap

NO	JENIS BARANG	NILAI
A	ASET TETAP	5.156.104.840,00
1	Tanah	354.212.500,00
2	Peralatan dan Mesin	5.305.468.747,50
3	Gedung dan Bangunan	3.224.491.747,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	115.651.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	60.092.400,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.903.811.554,50)
B	ASET LAINNYA	78.353.666,67
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00
2	Aset Tidak Berwujud	113.228.500,00
3	Aset Rusak Berat	294.652.888,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(103.346.833,33)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(226.180.888,00)
JUMLAH		5.234.458.506,67

D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pasal 54 menyatakan bahwa setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi. Selain itu APIP wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP, sebagai berikut :

1. Mengetahui jumlah hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap secara periodik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT;
2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP secara berkala;
3. Mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan APIP;
4. Tersedianya informasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;

5. Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan Intern Pemerintah.

E. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, meliputi kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT maupun Non PKPT. Adapun Program Penyelenggaraan Pengawasan tersebut, antara lain meliputi:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
		- Audit Kinerja OPD	53.583.500,00	-
		- Paparan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan OPD	18.561.800,00	-
		- Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan (LARWASDA)	87.046.700,00	-
		b. Reviu Laporan Kinerja		
		- Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	96.194.000,00	32.668.300,00
		- Evaluasi Pengarustamaan Gender (PUG)	16.193.400,00	-
		- Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	120.818.100,00	11.039.550,00
		- Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	13.206.000,00	-
		- Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	7.402.700,00	438.300,00
		- Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	9.103.400,00	-
		- Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Definitif dan RKPD Perubahan)	15.353.400,00	735.000,00
		c. Reviu Laporan Keuangan		
		- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD-BUD)	11.257.700,00	1.950.000,00
		- Reviu Laporan Keuangan OPD (LK-OPD)	36.647.700,00	4.450.000,00
		d. Pengawasan Desa		
		- Audit Kinerja Desa	46.257.200,00	26.620.000,00
		- Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pengelolaan Dana Desa	135.317.200,00	2.640.000,00
		e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
		- Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	113.668.500,00	16.995.000,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
		- Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus/Audit PKKN	182.836.500,00	24.530.000,00
		- Penyelesaian Kerugian Daerah	46.423.500,00	-
		b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
		- Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pengelolaan Dana BOS	46.393.400,00	28.713.050,00
		- Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pengelolaan Dana UPTD Puskesmas	24.093.400,00	1.440.000,00
		- Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pengelolaan Dana Kelurahan	14.083.400,00	1.200.000,00
		- Pengawasan Lainnya	476.788.900,00	108.208.516,00
		JUMLAH	1.571.230.400,00	261.627.716,00

F. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap antara lain meliputi :

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
		- Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	133.900.000,00	3.720.000,00
		b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
		- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH (IHPS)	8.193.700,00	2.897.000,00
2	Pendampingan dan Asistensi	a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
		- Pendampingan/Evaluasi Manajemen Risiko pada OPD	79.297.700,00	-
		- Penilaian Maturitas SPIP dan Penilaian Kapabilitas APIP	115.046.000,00	112.500,00
		- Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	260.755.400,00	163.434.700,00
		b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
		- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).	31.442.400,00	10.548.800,00
		- Sosialisasi/Evaluasi/Verifikasi Zona Integritas (ZI) oleh Tim Penilai Internal	21.546.100,00	498.100,00
		c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
		- Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemkab Cilacap (Koordinasi POLRES - Kejaksaan)	249.108.000,00	60.359.000,00
		- Monitoring, Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Aksi Korsupgah KPK	36.892.000,00	630.000,00
		- Sosialisasi/Diseminasi/Workshop Korsupgah Pemerintah Desa dan Sekolah	199.095.200,00	-
		- Fasilitasi Sosialisasi Saber Pungli	338.602.300,00	19.338.300,00
		- Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	197.188.800,00	-
		- Evaluasi LHKASN	70.000.000,00	-
		- Survey Penilaian Integritas	47.698.100,00	9.719.550,00
		JUMLAH	1.788.765.700,00	271.257.950,00

BAB II HASIL PENGAWASAN

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sampai dengan Semester I tahun anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan berdasarkan PKPT semester 1 Tahun 2024.

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada semester 1 Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebanyak 323 (Tiga ratus dua puluh tiga) Kegiatan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Cilacap. Adapun program pengawasan dan realisasinya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya Berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester 1 Tahun 2024

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jml KP	Jml dana pengawasan (Rp.)	Jml KP	Jml dana pengawasan (Rp.)	Jml KP	Jml dana pengawasan (Rp.)
A	Audit -Kinerja -PDTT	64	548.988.100,00	32	85.143.050,00	-	-
B	Reviu	61	213.789.000,00	59	23.812.850,00	-	-
C	Evaluasi	62	217.995.900,00	55	32.668.300,00	-	-
D	Pemantauan	150	113.668.500,00	138	16.995.000,00	-	-
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya	35	476.788.900,00	39	136.883.516,00	-	-
	Jumlah		1.571.230.400,00		295.502.716,00	-	-

Keterangan:

- a. KP = Kegiatan Pengawasan
- b. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan

Grafik 1
Realisasi Kegiatan Pengawasan Berdasarkan PKPT Semester 1 Tahun 2024



* Data Semester I Tahun 2024

Pada semester 1 Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan sebanyak 323 (Tiga ratus dua puluh tiga) objek pengawasan. Adapun penjelasan rinci kegiatan pengawasan per jenis kegiatan dan per objek pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 3
Kegiatan Pengawasan per Jenis Kegiatan berdasarkan PKPT dan Non PKPT Semester 1 Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	Prosentase
A	Audit/Pemeriksaan	32	9.91%
	Sub: Audit Kinerja		
1	Audit Kinerja TIK	1	0.31%
2	Audit Kinerja SKPD	2	0.62%
3	Audit Kinerja Desa	5	1.55%
	Sub: Audit Dengan Tujuan Tertentu		
4	Audit Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI	2	0.62%
5	Audit Investigasi	4	1.24%
6	Pemeriksaan Khusus Aduan Masyarakat	1	0.31%
7	PDTT Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	10	3.10%
8	PDTT Pengelolaan Keuangan APBD TA 2023	1	0.31%
9	PDTT Pengelolaan Dana Kelurahan	2	0.62%
10	PDTT Evaluasi Penyusunan APBDES	2	0.62%
11	PDTT Kegiatan PTSL	2	0.62%

No	Uraian	Jumlah	Prosentase
B	Reviu	59	18.27%
12	Reviu Laporan Realisasi DAU	7	2.17%
13	Reviu DAK Fisik	19	5.88%
14	Reviu SIM RS	1	0.31%
15	Reviu Laporan Keuangan SKPD	10	3.10%
16	Reviu LPPD	1	0.31%
17	Reviu Kontrak Daftar Hitam	1	0.31%
18	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	4	1.24%
19	Reviu Dana Hibah	1	0.31%
20	Reviu LKPD BUD	1	0.31%
21	Reviu Usulan Penjualan Kendaraan Dinas	1	0.31%
22	Reviu Kinerja	5	1.55%
23	Reviu Dokumen RKPD	1	0.31%
24	Reviu THR dan Gaji-13 PPPK	1	0.31%
25	Reviu RPJPD	1	0.31%
26	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	1	0.31%
27	Reviu ASB	1	0.31%
28	Reviu Pembayaran Gaji PPPK	1	0.31%
29	Laporan Reviu Perbaikan Dan Pengganti Data Calon Penerima Manfaat Percepatan Air Limbah Domestik	2	0.62%
C	Evaluasi	55	17.03%
30	Evaluasi LKJIP	55	17.03%
D	Pemantauan	138	42.72%
31	Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD	2	0.62%
32	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Desa Anti Korupsi	1	0.31%
33	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah	133	41.18%
34	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	1	0.31%
35	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	1	0.31%
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya	39	12.07%
36	Probity Audit Tahap Perencanaan	2	0.62%
37	Verifikasi Data by Name by Address (BNBA)	2	0.62%
38	Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	11	3.41%
39	Pengumpulan Bahan dan Keterangan Atas Pengaduan Masyarakat	1	0.31%
40	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	6	1.86%
41	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi	5	1.55%
42	Opname Kas Persediaan	10	3.10%
43	Evaluasi Internal (Perencanaan/Ex-Ante dan Pelaksanaan/On going) Reformasi Birokrasi	2	0.62%
	JUMLAH	323	100%

Keterangan:

- KP = Kegiatan Pengawasan
- Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan

Tabel 4
Jumlah Objek Pengawasan Semester 1 Tahun 2024

No	Objek Pemeriksaan	323	100.00%
A	Sekolah Negeri	15	4.64%
1	Opname Kas Persediaan	4	1.24%
2	PDTT Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	10	3.10%
3	Pemeriksaan Khusus Aduan Masyarakat	1	0.31%
B	Kecamatan	30	9.29%
4	PDTT Pengelolaan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2023	1	0.31%
5	Reviu Laporan Keuangan SKPD	4	1.24%
6	Evaluasi LKJIP	24	7.43%
7	Reviu THR dan Gaji-13 PPPK	1	0.31%
C	Desa/Kelurahan	25	7.74%
8	PDTT Pengelolaan Dana Kelurahan	2	0.62%
9	Audit Kinerja Desa	5	1.55%
10	Audit Investigasi	1	0.31%
11	PDTT Evaluasi Penyusunan APBDES	2	0.62%
12	Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Desa Anti Korupsi)	11	3.41%
13	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kegiatan PTSL	2	0.62%
14	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Desa Anti Korupsi	1	0.31%
15	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Pengaduan Masyarakat	1	0.31%
D	OPD	95	29.41%
16	Opname Kas Persediaan	6	1.86%
17	Verifikasi Data By Name By Address (BNBA)	1	0.31%
18	Reviu Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum	7	2.17%
19	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	18	5.57%
20	Reviu Kinerja	3	0.93%
21	Reviu Laporan Keuangan SKPD	6	1.86%
22	Reviu LPPD	1	0.31%
23	Reviu Kontrak Daftar Hitam	1	0.31%
24	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	3	0.93%
25	Evaluasi LKJIP	29	8.98%
26	Audit Investigasi	3	0.93%
27	Reviu LKPD BUD	1	0.31%
28	Audit Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI	2	0.62%
29	Reviu Dokumen RKPD	1	0.31%
30	Audit Kinerja SKPD	2	0.62%
31	Reviu RPJPD	1	0.31%
32	Penjaminan Kualitas Maturisasi SPIP Terintegrasi	5	1.55%
33	Reviu ASB	1	0.31%
34	Reviu Pembayaran Gaji PPPK	1	0.31%
35	Reviu TIK	1	0.31%

No	Objek Pemeriksaan	323	100.00%
36	Laporan Reviu Perbaikan Dan Pengganti Data Calon Penerima Manfaat Percepatan Air Limbah Domestik	2	0.62%
E	Lainnya	158	48.92%
37	Probit Audit Tahap Perencanaan	2	0.62%
38	Reviu SIM RS	1	0.31%
39	Percepatan Verifikasi BNBA	1	0.31%
40	Reviu Dana Hibah	1	0.31%
41	Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD	2	0.62%
42	Evaluasi LKJIP	2	0.62%
43	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1	0.31%
44	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1	0.31%
45	Reviu Usulan Penjualan Kendaraan Dinas	1	0.31%
46	Reviu Kinerja	2	0.62%
47	Evaluasi Internal (Perencanaan/Ex-Ante dan Pelaksanaan/On-Going) Reformasi Birokrasi	2	0.62%
48	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	6	1.86%
49	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	1	0.31%
51	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah	133	41.18%
52	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	1	0.31%
53	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	1	0.31%

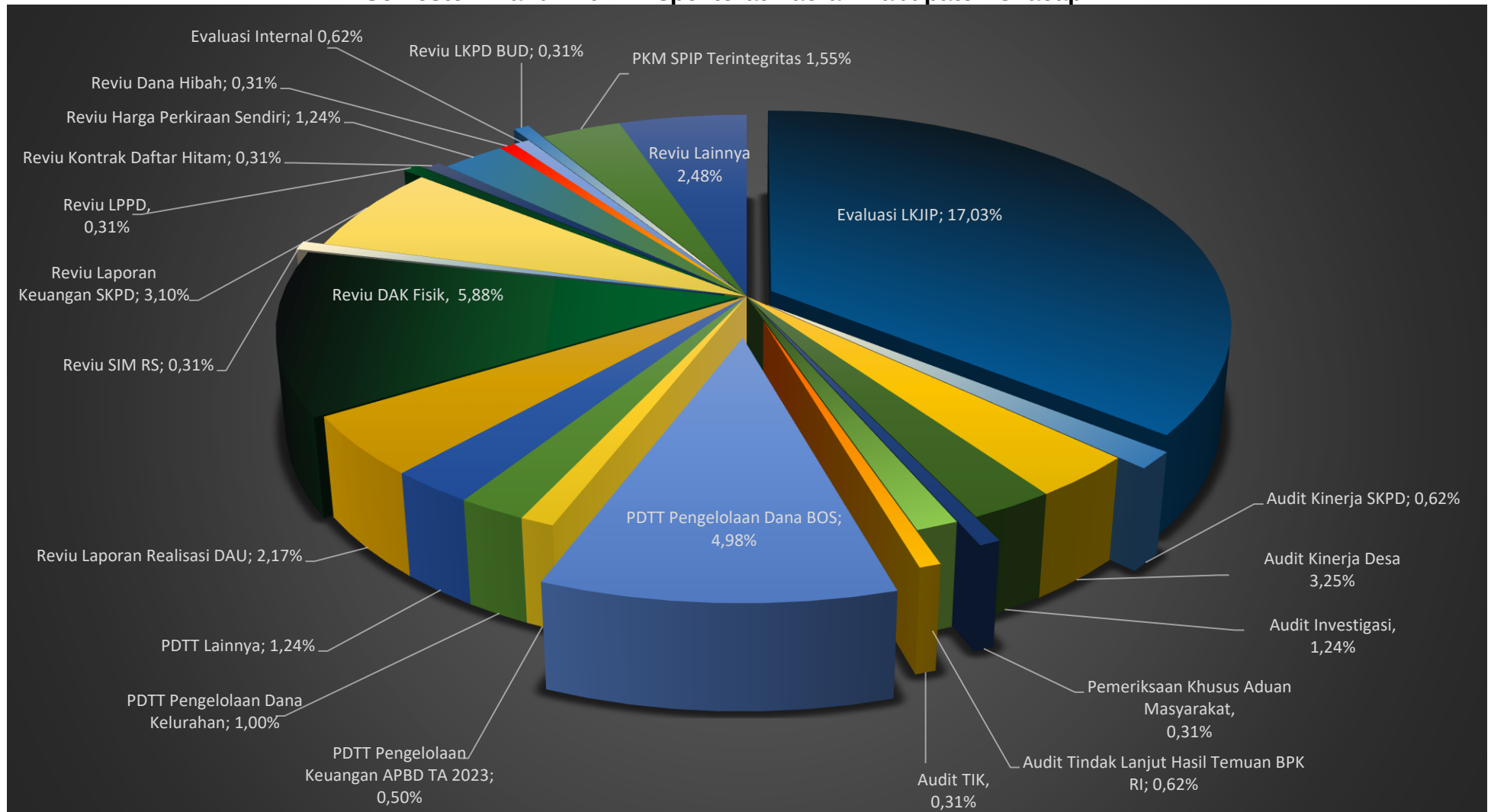
*Data semester I tahun 2024

Dalam pelaksanaan PKPT tersebut di atas, telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 700/520/14/TAHUN 2024 tentang Penetapan Pembagian Wilayah Tugas Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 sebagai berikut :

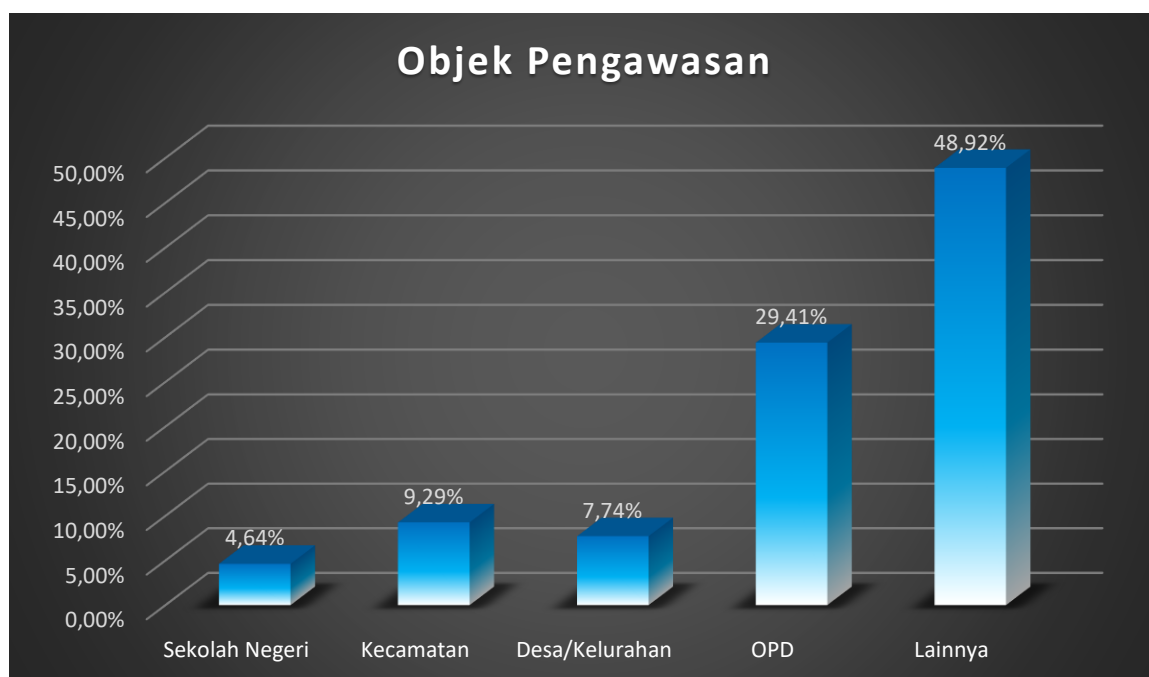
NO.	INSPEKTUR PEMBANTU I	INSPEKTUR PEMBANTU II	INSPEKTUR PEMBANTU III	INSPEKTUR PEMBANTU IV	INSPEKTUR PEMBANTU V
1.	DINAS P dan K	SEKRETARIAT DPRD	BAPPEDA	DINKES KB	SEKRETARIAT DAERAH
2.	SATPOL PP	BPBD	BPKAD	RSUD CILACAP	DISDUKCAPIL
3.	DISPARPORA	DINSOS PP PA	BAPENDA	RSUD MAJENANG	DINAS PERIKANAN
4.	DISNAKERIN	DISKOMINFO	INSPEKTORAT DAERAH	DPUPR	DPMPTSP
5.	DPKUKM	DINAS PERTANIAN	DISHUB	DINAS PSDA	WIL. KEC KARANGPUCUNG
6.	BAKESBANGPOL	DISPERMADES	BKPSDM	DLH	WIL. KEC GANDRUNGMANGU
7.	WIL. KEC WANAREJA	DINAS ARPUS	WIL. KEC CIMANGGU	WIL. KEC MAJENANG	WIL. KEC KAWUNGANTEN
8.	WIL. KEC KEDUNGREJA	DISHANPAN	WIL. KEC CIPARI	WIL. KEC SIDAREJA	WIL. KEC BINANGUN
9.	WIL. KEC BANTARSARI	WIL. KEC DAYEUEHLUHUR	WIL. KEC ADIPALA	WIL. KEC KESUGIHAN	PT CILACAP SEGARA ARTHA
10.	WIL. KEC NUSAWUNGU	WIL. KEC PATIMUAN	WIL. KEC SAMPANG	WIL. KEC MAOS	
11.	WIL. KEC CILACAP TENGAH	WIL. KEC JERUKLEGI	WIL. KEC CILACAP UTARA	WIL. KEC KAMPUNG LAUT	
12.	PD.PERCETAKAN GRAFIKA INDAH	WIL. KEC KROYA	PERUMDA CAHAYA H USADA	PERUMDAM TIRTA WIJAYA	
13.		WIL. KEC CILACAP SELATAN			

Grafik 2

**Realisasi Pengawasan Per Jenis Kegiatan Pengawasan
Semester I Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap**



Grafik 3.
Objek Pengawasan Semester 1 Tahun 2024



Pada semester I Tahun 2024 terdapat 323 (Tiga ratus dua puluh tiga) kegiatan pengawasan dengan 445 temuan 766 rekomendasi dengan nilai Rp.619,694,563.89 dengan rincian temuan sesuai Tabel 5 Temuan Hasil Audit/Pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap semester I Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap semester I Tahun 2024

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.00.00			
1	Kerugian Negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	66	14.83%	611.587.025,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	-	-	-
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	24	5.39%	8.107.538,89
4	Administrasi	1.04.00	355	79.78%	-
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-
	Subtotal Kejadian		445	100%	619.694.563,89

No	Sub Kelompok Temuan*)	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	-	-	-
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	-	-	-
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	-	-	-
	Subtotal Kejadian		-	-	-
	Temuan 3 E	3.00.00			
1	Ketidakhematan/pemborosan/ Ketidakekonomisan	3.01.00	-	-	-
2	Ketidakefisienan	3.02.00	-	-	-
3	Ketidakefektifan	3.03.00	-	-	-
	Subtotal Kejadian		-	-	-
	Jumlah Kejadian		445	100%	619.694.563,89

*Data Semester I Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan kelemahan yang sering terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan total temuan dapat dilihat bahwa temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan sebanyak 445 kejadian.

Persentase temuan terbanyak terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan, sehingga penekanan terhadap peraturan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebagai upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dalam rangka peningkatan kapasitas daerah dan menekan terjadinya temuan pada pemeriksaan selanjutnya.

Permasalahan yang sering terjadi antara lain:

- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tertib;
- Penatausahaan dan Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tertib;
- Pengeluaran Dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan;
- Inefisiensi belanja Material untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang berakibat terjadi pemborosan keuangan daerah/desa;

- e. Pelaksanaan pekerjaan sarana prasarana tidak sesuai dengan volume sesuai dengan RAB;
- f. Pajak atas belanja dana desa belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara;
- g. Belanja langsung tidak diyakini kebenarannya;
- h. Belanja tidak disertai dengan bukti dukung yang memadai sebagai lampiran LPJ.

Terhadap 445 temuan, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah memberikan 766 rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan/tindak lanjut. Rekomendasi dirancang untuk memperbaiki kelemahan dan meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada. Pengelompokan rekomendasi temuan hasil audit/pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada Semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Rekomendasi Temuan Hasil Audit/Pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Semester I Tahun 2024

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat.	71	9.27%	619.694.563,89
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah,BUMN/D, dan masyarakat	-	-	-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	-	-	-
4	Penghapusan barang milik negara/daerah	-	-	-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	-	-	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi	679	88.64%	-
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	-	-	-
8	Peningkatan kualitas dan sumber daya manusia pendukung system pengendali	-	-	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan.	-	-	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi.	-	-	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang.	16	2.09%	-

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern.	-	-	-
13	Pelaksanaan Sosialisasi	-	-	-
14	Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	766	100%	619.694.563,89

*Data Semester I Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rekomendasi yang paling sering diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, antara lain:

1. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi 679 rekomendasi (88.64%);
2. Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat 71 rekomendasi (9.27%);
3. Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang 16 rekomendasi (2.09%).

Disamping itu, berdasarkan nilai temuan rekomendasi yang paling banyak diberikan adalah terkait Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat yaitu sebesar Rp.619.694.563,89.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penertiban dan tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Mengadakan Pembinaan dan fasilitasi terhadap SDM yang ada di Desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- Bupati agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa guna tertib administrasi;
- Untuk pengelolaan Dana BOS agar mengintensifkan rekonsiliasi data antara sekolah dengan Dinas P dan K;
- Meningkatkan fungsi verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dalam penatausahaan pertanggungjawaban keuangan APBD.

Adapun hasil kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester I Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

A. Audit

1. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta ketaatan pada

peraturan. Dalam melaksanakan audit/pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 mengacu pada PKPT yang ditetapkan. PKPT tercantum dalam Keputusan Bupati Cilacap Nomor 700/519/14/Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024. Hasil Audit Kinerja Inspektorat Daerah pada Semester 1 Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Realisasi Audit Kinerja semester I Tahun 2024

No	Kegiatan Audit Kinerja	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jml KA	Jml dana pengawasan (Rp)	Jml KA	Jml dana pengawasan (Rp)	Jml KA	Jml dana Pengawasan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Kinerja					-	-
	- Audit Kinerja SKPD	5	53.583.500	-	-		
	- Audit Kinerja Desa	5	46.257.200	5	26.620.000		
	Jumlah	10	99.840.700	5	26.620.000	-	-

*Data Semester I Tahun 2024

Keterangan:

- a. KA = Kegiatan Audit
- b. OA = Objek Audit
- c. Realisasi audit di isi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Tabel 8
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit semester I Tahun 2024

No	Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jml KA	Jml dana pengawasan (Rp)	Jml KA	Jml dana pengawasan (Rp)	Jml KA	Jml dana Pengawasan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Audit Investigasi/ Pemeriksaan khusus/kasus	5	91,418,250	5	24,530,000	-	-
	Jumlah	5	91,418,250	5	24,530,000	-	-

*Data Semester I Tahun 2024

Keterangan:

- a. KA = Kegiatan Audit
- b. OA = Objek Audit
- c. Realisasi audit di isi berdasarkan jumlah laporan hasil audit yang diterbitkan

Tabel 9
Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus Semester I Tahun 2024

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah Objek Pemeriksaan Kasus	5
Jumlah Pemeriksaan Kasus berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	2
% Pemeriksaan berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	40.00%

*Data Semester I Tahun 2024

Tabel 10
Kode Etik dan Standar Audit yang digunakan

Kode etik dan standar audit	Dasar peraturan perundang-undangan
1	2
1. Perilaku Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan tuntutan Organisasi a. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Kab. Cilacap mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab. b. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk memiliki/memanfaatkan semua keahlian/profesionalisme yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya. c. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap menjaga sifat objektif dalam tugas d. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk mempertahankan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. e. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk menyimpan rahasia	Peraturan Bupati Cilacap Nomor 135 Tahun 2012 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.

Kode etik dan standar audit	Dasar peraturan perundang-undangan
1	2
jabatan, rahasia Negara atau rahasia Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap. f. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap untuk memanfaatkan dan memberdayakan segala sumber daya yang ada secara inovatif untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasan g. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap memiliki pengabdian yang tinggi terhadap organisasinya.	
2. Perilaku Aparat Inspektorat Dalam Berinteraksi Dengan sesama Aparat Inspektorat Kabupaten a. Keharusan Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama Aparat Inspektorat Kabupaten. b. Keharusan Bagi Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menjaga kebersamaan dan rasa kekeluargaan tanpa mengorbankan kepentingan organisasi.	
3. Perilaku Aparat Inspektorat Kabupaten Dalam Berinteraksi Dengan pihak yang diperiksa/Auditan a. Keharusan bagi Aparat Inspektorat untuk senantiasa menjaga penampilannya sesuai dengan tugas Aparat Inspektorat. b. Keharusan Aparat Inspektorat Kabupaten untuk mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diperiksa/Auditan. c. Keharusan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dengan pihak yang diperiksa/auditan d. Keharusan bagi Aparat Inspektorat menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak yang diperiksa/auditan. e. Keharusan bagi Aparat Inspektorat untuk tidak menerima imbalan/pemberian apapun diluar ketentuan yang berlaku	

Kode etik dan standar audit	Dasar peraturan perundang-undangan
1	2
PEMANTAUAN KODE ETIK Pelaksanaan Kode Etik Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap dilakukan pemantauannya oleh masing-masing atasan Aparat Inspektorat Kabupaten secara berjenjang sesuai dengan tingkat kedudukannya. SANKSI ATAS KODE ETIK APARAT INSPEKTORAT KABUPATEN Setiap PNS selaku Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas pengawasan jika melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi yang mengacu kepada hasil rekomendasi Badan Kehormatan Profesi.	

B. Reviu

Salah satu tugas APIP dalam melaksanakan perannya ialah dengan melakukan kegiatan reviu. Reviu merupakan penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan reviu pada semester I Tahun 2024 sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) kegiatan.

Kegiatan reviu yang paling sering dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap yaitu Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan jumlah LHR terbit sebanyak 19. Kemudian Reviu Laporan Keuangan SKPD dengan jumlah LHR terbit sebanyak 10. Serta Reviu Kinerja dengan jumlah LHR terbit sebanyak 5.

Berikut merupakan rincian kegiatan reviu yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester I Tahun 2024:

Tabel 11
Jumlah Kegiatan Reviu pada semester I Tahun 2024

No	Kegiatan Reviu	Realisasi	Prosentase
1	Reviu Laporan Realisasi DAU	7	11,67%
2	Reviu DAK Fisik	19	31,67%
3	Reviu SIM RS	1	1,67%
4	Reviu Laporan Keuangan SKPD	10	16,67%
5	Reviu LPPD	1	1,67%
6	Reviu Kontrak Daftar Hitam	1	1,67%
7	Reviu Harga Perkiraan Sendiri	4	6,67%
8	Reviu Dana Hibah	1	1,67%
9	Reviu LKPD BUD	1	1,67%
10	Reviu Usulan Penjualan Kendaraan Dinas	1	1,67%
11	Reviu Kinerja	5	8,33%
12	Reviu Dokumen RKPD	1	1,67%
13	Reviu THR dan Gaji-13 PPPK	1	1,67%
14	Reviu RPJPD	1	1,67%
15	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	1	1,67%
16	Reviu ASB	1	1,67%
17	Reviu Pembayaran Gaji PPPK	1	1,67%
18	Laporan Reviu Perbaikan Dan Pengganti Data Calon Penerima Manfaat Percepatan Air Limbah Domestik	2	3,33%
Jumlah		59	100%

*Data Semester I Tahun 2024

C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pada semester I Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan evaluasi sebanyak 55 (Lima puluh lima) Kegiatan Evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi AKIP diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB). Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja

pemerintah. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh OPD, Kecamatan dan BLUD yang ada di Kabupaten Cilacap dengan rincian nilai SAKIP Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di OPD Kabupaten Cilacap

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai 2023	Predikat
1	Sekretariat Daerah	82.61	A
2	Dishub	80.45	A
3	BKPPD	82.15	A
4	Diskominfo	77.75	BB
5	Dinsos	81.25	A
6	Dinas Arpus	80.60	A
7	BPPKAD	80.20	A
8	Kecamatan Jeruklegi	78.70	BB
9	Kecamatan Cilacap Tengah	78.95	BB
10	Kecamatan Cilacap Selatan	77.10	BB
11	Inspektorat	82.40	A
12	DPUPR	80.75	A
13	Kecamatan Gandrungmangu	76.20	BB
14	Dinas P dan K	82.70	A
15	Disporapar	80.95	A
16	Dinkes	83.00	A
17	Kecamatan Patimuan	77.90	BB
18	Kecamatan Cimanggu	76.45	BB
19	Disdukcapil	80.60	A
20	Kecamatan Sampang	78.85	BB
21	Dinas Perikanan	81.65	A
22	DPMPTSP	76.00	BB
23	Dispartan	80.70	A
24	Disperkimta	77.15	BB
25	Dinas KB, PP dan PA	79.35	BB

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai 2023	Predikat
26	Kecamatan Cilacap Utara	78.10	BB
27	Kecamatan Kroya	76.40	BB
28	Kecamatan Karangpucung	75.30	BB
29	Kecamatan Sidareja	80.25	A
30	Kecamatan Dayeuhluhur	76.95	BB
31	RSUD Cilacap	78 .00	BB
32	Kecamatan Adipala	80.80	A
33	Kecamatan Maos	76.30	BB
34	Kecamatan Majenang	80.60	A
35	Kecamatan Kedungreja	81.50	A
36	Dispermades	78.65	BB
37	Disnakerin	80.60	A
38	Sekretariat DPRD	77.70	BB
39	Kecamatan Kawunganten	80.35	A
40	Kecamatan Kesugihan	77.40	BB
41	BPBD	75.75	BB
42	Kecamatan Bantarsari	81.80	A
43	DLH	76.65	BB
44	Kecamatan Kampunglaut	75.20	BB
45	RSUD Majenang	77.25	BB
46	Kecamatan Binangun	75.65	BB
47	Dinas PSDA	75.15	BB
48	Kecamatan Wanareja	81.35	A
49	Bakesbangpol	78.10	BB
50	DPKUKM	80.60	A
51	Kecamatan Nusawungu	77.75	BB
52	Dispabun	79.05	BB
53	Satpol PP	76.60	BB
54	Kecamatan Cipari	75.80	BB
55	BAPPEDA	82.14	A

*Data Per 1 Agustus 2024

D. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada semester I Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pemantauan sebanyak 138 (Seratus tiga puluh delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13
Kegiatan Pemantauan/Monitoring pada Semester I Tahun 2024

No	Kegiatan Pemantauan/Monitoring	Realisasi	Prosentase
1	Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD	2	1.45%
2	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Desa Anti Korupsi	1	0.72%
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah	133	96.38%
4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	1	0.72%
5	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	1	0.72%
Jumlah		138	100%

*Data Semester I Tahun 2024

Selain kegiatan pemantauan diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap juga melaksanakan pemantauan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) yang telah disajikan dalam bentuk matriks tindaklanjut yang terdapat dalam Lampiran I.

E. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pada semester I Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Kegiatan Pengawasan Lainnya semester I Tahun 2024

No	Kegiatan Pemantauan/Monitoring	Realisasi	Prosentase
1	Probit Audit Tahap Perencanaan	2	5,13%
2	Verifikasi Data by Name by Address (BNBA)	2	5,13%
3	Pendampingan Hasil Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	11	28,21%
4	Pengumpulan Bahan dan Keterangan Atas Pengaduan Masyarakat	1	2,56%
5	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	6	15,38%
6	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi	5	12,82%
7	Opname Kas Persediaan	10	25,64%
8	Evaluasi Internal (Perencanaan/Ex-Ante dan Pelaksanaan/On going) Reformasi Birokrasi	2	5,13%
Jumlah		39	100.00%

*Data Semester I Tahun 2024

Selain kegiatan pengawasan lainnya yang berdasarkan PKPT diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap juga mempunyai tambahan tugas pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Adapun Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 15
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya Semester 1 Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Capaian	
		Anggaran	Kuantitas	Anggaran	Kuantitas	Angg (%)	Kuan (%)
1	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	133.900.000	1	3.720.000	0	2,78%	17,00%
2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH (IHPS)	8.193.700	2	2.897.000	1	35,36%	50,25%
3	Penilaian Maturitas SPIP dan Penilaian Kapabilitas APIP	115.046.000	10	112.500	5	0,10%	50,00%
4	Sosialisasi Tematik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	260.755.400	21	163.434.700	21	62,68%	100,00%
5	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	31.442.400	5	10.548.800	3	33,55%	60,00%
6	Fasilitasi Sosialisasi Saber Pungli	338.602.300	11	19.338.300	1	5,71%	9,09%
7	Koordinasi POLRES-KEJAKSAAN	249.108.000	24	60.359.000	16	24,23%	66,67%
8	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan Aksi Korsupgah KPK	36.892.000	4	630.000	0	1,71%	0,00%
9	Survey Penilaian Integritas	47.698.100	52	9.719.550	52	20,38%	100%
Jumlah		1.221.637.900	130	270.759.850	99		

*Data semester I Tahun 2024

BAB III

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Cilacap meliputi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP yang terdiri dari Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.

Dalam upaya percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dilakukan pemantauan perkembangan tindak lanjut antara lain dengan cara mengadakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dengan pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan tindak lanjut. Kegiatan pemantauan tindak lanjut dilakukan dengan datang langsung ke Objek pemeriksaan/Auditan dan melakukan koordinasi untuk penyelesaian tindak lanjut. Penugasan tersebut untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya.

Kegiatan pemutakhiran data atau pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan telah dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan Juni 2024 yang diselenggarakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan 1 (satu) kali pada bulan Mei 2024 bertempat di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan semester I Tahun 2024 menunjukkan masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya, dengan status dalam proses tindak lanjut. Hal tersebut antara lain disebabkan karena terdapat rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian tindak lanjut lama, temuan sulit untuk ditindaklanjuti, dan merupakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT yang baru terbit, sehingga sampai dengan Semester I Tahun 2024 belum selesai tindak lanjutnya.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – RI

Pemantauan tindak lanjut dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tahun 2005 s/d semester I Tahun 2024 adalah sebanyak 1.008 rekomendasi. Hasil pemantauan sampai dengan semester I Tahun 2024, terdapat 69 (Enam puluh sembilan) rekomendasi dalam proses tindak lanjut merupakan temuan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- LKPD Tahun 2004 sebanyak 2 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2006 sebanyak 3 rekomendasi;
- LHP Belanja Daerah Tahun 2007 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2008 sebanyak 2 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2009 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2011 sebanyak 5 rekomendasi;
- LHP PDTT PAD Tahun 2012 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2013 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2014 sebanyak 2 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2015 dan LHP Manajemen Aset sebanyak 12 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2016 dan LHP Kinerja UMKM sebanyak 6 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2017 dan LHP Kinerja Desa sebanyak 2 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2018 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2020 sebanyak 5 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2021 sebanyak 1 rekomendasi;
- LKPD Tahun 2022 sebanyak 5 rekomendasi.
- LKPD Tahun 2023 sebanyak 19 rekomendasi.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

- 1) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.

Status temuan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester I Tahun 2024 terdapat 445 temuan dan 766 rekomendasi, sampai dengan semester 1 2024 dari 766 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 638 rekomendasi dan dalam proses sebanyak 128 rekomendasi.

- 2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

Selama Semester I Tahun 2024 tidak terdapat pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis di Kabupaten Cilacap.

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan Masyarakat yang ditangani Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap meliputi pengaduan masyarakat yang ditujukan langsung kepada Bupati Cilacap, informasi dari surat aduan, media sosial, permintaan OPD maupun limpahan dari instansi vertikal lainnya.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009, tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat Instansi Pemerintah.

Selama Semester I Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap menangani kasus pengaduan masyarakat sebanyak 5 aduan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

No	Kegiatan	Sumber aduan
1	Audit Investigasi pada Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan (Terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan)	Limpahan Kejaksaan
2	Audit Investigasi Dugaan Penyelewengan Bonus atas Prestasi pada BLUD UPTD Puskesmas se Kabupaten Cilacap Tahun 2023	Limpahan Kejaksaan
3	Audit Investigasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Terkait dugaan tindak pidana korupsi paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas SDN Bumireja 02 Kecamatan Kedungreja Tahun Anggaran 2023)	Limpahan Kepolisian
4	Audit Investigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Terkait dugaan penyimpangan pengelolaan alat berat pada UPTD Perbengkolan)	Limpahan Kejaksaan
5	Pemeriksaan Khusus pada SDN Sarwadadi 04 Kecamatan Kawunganten (Terkait dugaan pungutan biaya perpisahan Kelas 6)	Limpahan Ombudsman

*Data Semester I Tahun 2024

Berkaitan dengan proses penyelesaian pengaduan masyarakat, dapat dilihat pada lampiran 3.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pemantauan monitoring dan kegiatan penunjang pengawasan lainnya.
2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester I Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Audit/Pemeriksaan sebanyak 32 (Tiga puluh dua) kegiatan;
 - b. Kegiatan Reviu dilaksanakan sebanyak 59 (Lima puluh sembilan) kegiatan;
 - c. Kegiatan Evaluasi dilaksanakan sebanyak 55 (Lima puluh lima) kegiatan;
 - d. Kegiatan Pemantauan dilaksanakan sebanyak 138 (Seratus tiga puluh delapan) kegiatan;
 - e. Kegiatan Pengawasan Lainnya sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) kegiatan.
3. Jumlah temuan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap pada semester I Tahun 2024 sebanyak 445 (Empat ratus empat puluh lima) berupa temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Adapun jumlah rekomendasi sebanyak 766 (Tujuh ratus enam puluh enam) rekomendasi, dengan prosentase terbesar adalah rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi sebanyak 679 (Enam ratus tujuh puluh sembilan) rekomendasi dengan prosentase sebesar 88.64%, diikuti penyetoran uang ke Kas Negara/Daerah/maupun Kas Desa/masyarakat sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) rekomendasi dengan prosentase sebesar 9.27% serta 16 rekomendasi Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang atau sebesar 2.09%.
4. Selama semester I Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap menangani kasus pengaduan masyarakat sebanyak 5 aduan masyarakat dan kasus tersebut telah selesai ditangani.
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP th 2005 s.d Semester I Tahun 2024, masih terdapat rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya dengan rincian sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah terdapat 452 (Empat ratus lima puluh dua) temuan dan 1.008 (Seribu delapan) rekomendasi. Status Tindak Lanjut selesai sesuai Rekomendasi (S) sebanyak 939 (Sembilan ratus tiga puluh sembilan) rekomendasi, Belum sesuai rekomendasi (D)

sebanyak 69 (Enam puluh sembilan) rekomendasi . Prosentase Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan Agustus 2024 sebesar 93.15%.

B. Hambatan

1. Hambatan Internal:

- a. Terbatasnya jumlah Auditor/PPUPD dibandingkan jumlah Objek Pengawasan.
- b. Kurangnya kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang bersifat spesifik dimasing-masing Inspektur Pembantu.

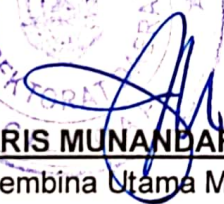
2. Hambatan Eksternal:

- a. Belum semua pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan.
- b. Sangat luasnya wilayah kerja Inspektorat Daerah sehingga tidak semua objek pemeriksaan dapat terjangkau pada setiap tahunnya.
- c. Belum efektifnya pelaksanaan SPIP/MR sesuai yang diharapkan sehingga berakibat terjadinya temuan berulang dalam pelaksanaan kegiatan OPD.

C. Saran / Rekomendasi

1. Untuk menambah kompetensi para pejabat fungsional Auditor dan PPUPD yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap perlu adanya peningkatan kemampuan baik melalui Bimtek, PKS maupun pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat baik Diklat Fungsional maupun Diklat Substansi.
2. Ditetapkan Pola Pembinaan dan hubungan kerja antar Aparatur Pengawasan (Auditor dan PPUPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap.
3. Kepada setiap jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu terus meningkatkan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP dan MR) secara berjenjang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
4. Untuk mengoptimalkan fungsi monitoring kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi verifikasi terhadap pengelolaan keuangan di desa serta perlu disusun pedoman teknis monitoring dan evaluasi dari Dispermades selaku Dinas Teknis, sehingga ada kejelasan maksud, tujuan, sasaran serta hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan fungsi tersebut.
5. Untuk pengelolaan dana BOS diperlukan adanya penambahan SDM pada dinas teknis sebagai pengampu atas permasalahan yang terjadi di lapangan dikarenakan sebagian besar pengelola BOS di sekolah adalah guru yang tidak memiliki dasar pengetahuan akuntansi.

6. Penambahan personil Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap baik melalui perekrutan/ pengadaan formasi CPNS maupun mutasi dari OPD/ Daerah lain guna menyeimbangkan beban kerja pengawasan yang harus dijalankan agar semua objek pengawasan terawasi setiap tahun secara rutin.
7. Dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan baik di OPD maupun Desa perlu terus dilakukan Bimbingan Teknis, sosialisasi dan fasilitasi dalam hal pengelolaan keuangan sehingga tidak terjadi temuan berulang dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *Good Government dan Clean Governance* dapat terwujud.
8. Perlunya penggunaan sistem aplikasi yang khusus menangani kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap, sehingga dapat dimonitor secara tepat dan akurat.

Cilacap, September 2024
**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN CILACAP**

ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199001 1 001

STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Posisi Per : 1 Juli 2024

Kode	HAPSEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN				SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES				TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI				KETERANGAN
		Lingkup Pemeriksaan Kelompok Temuan	JUMLAH		Nilai (Rp)	JUMLAH		Nilai (Rp)	JUMLAH		Nilai (Rp)	JUMLAH		Nilai (Rp)			
			Temuan	Saran		Temuan	Saran		Temuan	Saran		Temuan	Saran				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A	REKAPITULASI HP/AUDIT SMT I TA 2023																
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan		445	766	619.694.563.89	320	395	316.596.309.89	125	371	303.098.254.00	0	0		0.00		
2	Temuan Sistem Pengendalian Intern		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0.00		
3	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)		0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0		0.00		
	Jumlah		445	766	619.694.563.89	320	395	316.596.309.89	125	371	303.098.254.00	0	0		0.00		

*Data Semester I Tahun 2024

Cilacap, September 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199001 1 001

STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT : ITJEN KEMENTERIAN TEKNIS

Posisi Per : 30 Juni 2024

Kode	HAPSEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN				SELESAI DITINDAKLANJUTI				TEMUAN DALAM PROSES				TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI				KETERANGAN		
		Lingkup Pemeriksaan		JUMLAH		Nilai (Rp)		JUMLAH		Nilai (Rp)		JUMLAH		Nilai (Rp)		JUMLAH			Nilai (Rp)	
		Temuan	Saran	Temuan	Saran	Temuan	Saran	Temuan	Saran	Temuan	Saran	Temuan	Saran	Temuan	Saran	Temuan	Saran			
1	2		3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14		15	
A	HP TAHUN 2023																			
1	Temuan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis)		0	0			0	0			0	0			0	0				

* Data Semester I Tahun 2024

** Tabel sesuai dengan Lampiran PermenPAN No. 9 Tahun 2009 dengan kolom temuan sulit ditindaklanjuti diganti dengan kolom keterangan.

Cilacap September 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199001 1 001

LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2024
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
Posisi Per : 1 Juli 2024

No	Tanggal Pemeriksaan	Sumber Aduan	No. Surat	Perihal	Hasil	Action
1	04 Maret-19 April 2024	Limpahan Kejaksaan	R-1379/M.3.17/Dek.1/09/2023	Penyalahgunaan pengelolaan keuangan	Terbukti	Selesai
2	04 Maret-22 Maret 2024	Limpahan Kejaksaan	B-454/M.3.17/Fd.1/02/2024	Penyalahgunaan pengelolaan keuangan	Tidak terbukti	Selesai
3	06 Mei-17 Mei 2024	Limpahan Kepolisian	B/138/III/RES.3.3/2024/Reskrim	Penyalahgunaan pengelolaan keuangan	Terbukti	Selesai
4	27 Juni-05 Juli 2024	Limpahan Kejaksaan	B-1741/M.3.17/Fd.2/06/2024	Penyalahgunaan pengelolaan aset	Terbukti	Selesai
5	08 Juni-11 Juni 2024	Limpahan Ombudsman	-	Dugaan pungutan liar	Tidak terbukti	Selesai

*Data Semester I Tahun 2024

September 2024
INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN CILACAP

CARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199001 1 001

STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
BERDASARKAN APLIKASI SIP-TL BPK-RI

Kode	HAPSEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			KET
		Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Saran	Nilai (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
A	REKAPITULASI PEMERIKSAAN LKPD 2023													
	LHP LKPD Tahun 2023	17	25	1.607.541.497,00	0	182.143.335,00	25	1.425.398.162,00	0	-				
	Sub Jumlah (A)	17	25	1.607.541.497,00	0	182.143.335,00	25	1.425.398.162,00	0	-				
B	REKAPITULASI PEMERIKSAAN LKPD 2022													
	LHP LKPD Tahun 2022 dan LHP Kepatuhan belanja infrastruktur Tahun 2023	11	19	3,592,494,678.14	14	0,00	5	3,592,494,678.14	0	-				
	Sub Jumlah (B)	11	19	3,592,494,678.14	14	0,00	5	3,592,494,678.14	0	-				
C	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2021													
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan													
	Temuan SPI													
	Lain-lain	8	22	843,871,000.00	21	-	1	-	0	-				
	Sub Jumlah (C)	8	22	843,871,000.00	21	-	1	-	0	-				
D	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2020													
	Lain-lain	14	30	392,656,274.00	25	346.501.144,32	5	46.155.130,00	0	-				
	Sub Jumlah (D)	14	30	392,656,274.00	25	346.501.144,32	5	46.155.130,00	0	-				
E	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENANGANAN COVID – 19 TAHUN 2020													
	Lain-lain	8	15	-	13	-	2	-	0	-				
	Sub Jumlah (E)	8	15	-	13	-	2	-	0	-				

Kode	HAPSEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI		TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			KET
		Lingkup Pemeriksaan	Kelompok Temuan	Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
F													
REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2019													
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan	3	3	621,130,000.00	3	621,130,000.00	0	-	0	-	0	-	
	Temuan SPI	9	11	-	13	-	0	-	0	-	0	-	
	Sub Jumlah (F)	20	29	621,130,000.00	29	621,130,000.00	0	-	0	-	0	-	
G													
REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2018													
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan	8	23	778,192,481.12	22	778,192,481.12	1	-	0	-	0	-	
	Temuan SPI	5	19	-	19	-	0	-	0	-	0	-	
	Infrastruktur	3	4	2,982,508,650.00	4	2,982,508,650.00	0	-	0	-	0	-	
	Sub Jumlah (G)	16	46	3,760,701,131.12	45	3,760,701,131.12	1	-	0	-	0	-	
H													
REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2017													
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan	7	14	-	14	-	0	-	0	-	0	-	
	Temuan SPI	12	32	736,676,815.02	32	127,356,300.00	0	-	0	-	0	-	
	Dana Desa 2015-2018	8	15	-	13	-	2	-	0	-	0	-	
	Sub Jumlah (H)	27	61	736,676,815.02	59	127,356,300.00	2	-	0	-	0	-	
I													
REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2016													
	Temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan	8	23	-	22	-	1	-	0	-	0	-	
	Temuan SPI	11	29	2,268,210,231,71	26	1,773,267,731,71	3	-	0	-	0	-	
	UMKM 2016-2017	14	34	-	32	-	2	-	0	-	0	-	
	Sub Jumlah (I)	33	86	2,268,210,231,71	80	1,773,267,731,71	6	494.942.500,00	0	-	0	-	
J													
REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2015													
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan	4	13	287,249,193.60	10	287,249,193.60	3	-	0	-	0	-	
	Temuan Kelemahan SPI	10	29	-	29	-	0	-	0	-	0	-	
	Manajemen Aset	4	20	-	11	-	9	-	0	-	0	-	
	Sub Jumlah (J)	18	62	287,249,193.60	50	287,249,193.60	12	-	0	-	0	-	

Kode	HAPSEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			KET
		Lingkup Pemeriksaan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
													Kelompok Temuan	
K	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2014													
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan	2	5	947,502,571.24	4	-	0	-	0	-	0	-		
	Temuan Kelemahan SPI	2	10	-	10	-	0	-	0	-	0	-		
	Lain-lain	7	15	-	14	-	2	-	0	-	0	-		
	Sub Jumlah (K)	11	30	947,502,571.24	28	-	2	-	0	-	0	-		
L	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2013													
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan	7	21	822,758,562.00	21	822,758,562.00	0	-	0	-	0	-		
	Temuan Kelemahan SPI	9	29	-	28	-	1	-	0	-	0	-		
	OPS RSUD Cilacap	12	19	-	19	-	0	-	0	-	0	-		
	Sub Jumlah (L)	28	69	822,758,562.00	68	822,758,562.00	1	-	0	-	0	-		
M	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2012													
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan													
	Temuan Kelemahan SPI													
	Lain-lain	14	37	2,984,382,581.00	37	2,984,382,581.32	0	-	0	-	0	-		
	HIBAH 2012-2013	13	23	257,041,800.00	23	257,041,800.00	0	-	0	-	0	-		
	Sub Jumlah (M)	27	60	3,241,424,381.00	60	3,241,424,381.00	0	-	0	-	0	-		
N	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2011													
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan	6	12	1,216,097,715.32	7	1,216,097,715.32	5	-	0	-	0	-		
	Temuan Kelemahan SPI	16	34	990,561,862.00	34	990,561,862.00	0	-	0	-	0	-		
	PAD TA 2011-2012	16	61	27,272,707.00	60	18,022,707.00	1	9,250,000.00	0	-	0	-		
	Sub Jumlah (N)	38	107	2,364,886,283.32	101	1,614,834,113.32	6	9,250,000.00	0	-	0	-		
O	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2010													
	Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan	20	34	441,804,285.04	34	441,804,285.04	0	-	0	-	0	-		
	Temuan Kelemahan SPI	10	19	-	19	-	0	-	0	-	0	-		

Kode	HAPSEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN				SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI			KET	
		Lingkup Pemeriksaan	Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
														Kelompok Temuan		Temuan
	DAK 2009-2010		21	51	1,974,034,799.01	51	1,974,034,799.01					0	-	0	-	
	Sub Jumlah (O)		51	104	2,415,839,084.05	104	2,415,839,084.05					0	-	0	-	
P	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2009															
	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan		14	24	7,731,650,028.00	23	7,731,650,028.00					1	180,347,510.00	0	-	
	Temuan Kelemahan SPI		6	12	-	12	-					0	-	0	-	
	Sub Jumlah (P)		20	36	7,731,650,028.00	35	7,731,650,028.00					1	180,347,510.00	0	-	
Q	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2008															
	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan		1	4	-	4	-					0	-	0	-	
	Temuan Kelemahan SPI		7	21	-	21	-					0	-	0	-	
	Lain-lain		12	32	845,930,957.00	30	737,426,937.00					2	108,504,020.00	0	-	
	Pilkada 2005		13	16	8,136,196.00	16	8,136,196.00					0	-	0	-	
	Wajardikdas		11	26	-	26	-					0	-	0	-	
	Sub Jumlah (Q)		44	99	854,067,153.00	97	745,563,133.00					2	108,504,020.00	0	-	
R	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2007															
	Temuan Kepatuhan		6	8	11,814,254,599.00	8	11,814,254,599.00					0	-	0	-	
	Temuan Kelemahan SPI		5	5	-	5	-					0	-	0	-	
	Belanja Daerah		9	26	2,083,003,435.28	25	1,646,003,435.28					1	437,000,000.00	0	-	
	Sub Jumlah (R)		20	39	13,897,249,034.28	38	13,460,249,034.28					1	437,000,000.00	0	-	
S	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2006															
	Temuan Kepatuhan Terhadap Perundangan		7	16	10,131,759,997.00	13	9,435,801,827.00					3	635,273,353.00	0	-	
	Temuan Kelemahan SPI		3	7	-	7	-					0	-	0	-	
	Bantuan Parpol		2	3	-	3	-					0	-	0	-	
	Sub Jumlah (S)		12	26	10,131,759,997.00	23	9,435,801,827.00					3	635,273,353.00	0	-	
T	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2005															
	Laporan Keuangan Daerah Tahun 2005		13	20	1,696,047,946.10	20	1,696,047,946.10					0	-	0	-	

Kode	HAPSEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN				SELESAI DITINDAKLANJUTI		TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI		KET
		Jml	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
	Lingkup Pemeriksaan												
	Kelompok Temuan	Temuan	Saran		Saran		Saran		Saran		Saran		
	PDAM TA 2005	3	3	40,046,675.03	3	40,046,675.03	3	40,046,675.03	0	-	0	-	
	Sub Jumlah (T)	16	23	1,736,093,621.13	23	1,736,093,621.13	23	1,736,093,621.13	0	-	0	-	
U	REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN LKPD 2004												
	Laporan Keuangan Daerah Tahun 2004	18	31	4,007,544,913.69	29	915,228,062.69	2	3,092,316,851.00	0	-	0	-	
	PDAM TA 2004	3	4	-	4	-	0	-	0	-	0	-	
	Sub Jumlah (U)	21	35	4,007,544,913.69	33	915,228,062.69	2	3,092,316,851.00	0	-	0	-	
	TOTAL	452	1.008	IDR 59.119.810.193,96	939	45.319.667.659,96	69	13.800.142.534,00	0	-	0	-	

Cilacap, September 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN CILACAP


ARIS MUNANDAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199001 1 001